



RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

TAHUN 2025



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kebijakan ...

20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II
KEDUDUKAN DAN MUATAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- (3) Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

Pasal 5

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
 - c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- c. penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
- (4) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadir Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat Rahmat dan Inayah-NYA, sehingga Dokumen Renja Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Rencana Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja ini menyajikan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk 1 Tahun ke depan yang memuat kebijakan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD yang pada akhirnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD menjadi acuan perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Diharapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen Perencanaan Tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggara tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas.



**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Ajat Rochmat Jatnika, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710907 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II 13

HASIL EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023..... 13

2.1 Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023..... 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor 66

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor 69

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 74

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 109

BAB III..... 110

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG 110

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 110

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 112

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 114

BAB IV 116

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG116

BAB V 135

P E N U T U P 135

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun 2025 yang wajib disusun secara rutin oleh perangkat daerah berdasarkan bidang urusan/unsur sebagai amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025, dokumen ini disusun secara simultan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Di sisi lain, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian teknis dalam perumusan substansi dokumen Perencanaan daerah lainnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai implikasi dari akan berakhirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Penyusunan secara simultan antara 5 (lima) dokumen perencanaan daerah, akan berdampak pada padatnya proses penyusunan dokumen Perencanaan Daerah di tahun 2025.

Sehubungan dengan masih dipedomaninya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta tercantum dalam SIPD-RI.

Dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan penelaahan Renstra dan Renja Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang memiliki tugas utama penyusunan perencanaan pembangunan, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di samping itu dilakukan penelaahan juga Renstra dan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis bidang perencanaan pembangunan daerah serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis penelitian dan pengembangan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12)
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12)
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam mencapai target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2025.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Tahun 2025.
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini, hal-hal yang wajib ada adalah:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Renja (dituliskan nama PD) Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2024.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

Secara umum Bab II memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Bab ini memuat:

- berupa tujuan, sasaran, program dan kegiatan 5 tahun sebelumnya, sehingga tahun 2023, sebagaimana format table 2.1 terlampir. Disamping itu, data yang harus disajikan dalam dokumen adalah indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercapai, terlampaui dan tidak tercapai. Jika terlampaui dan tidak tercapai, wajib menyertakan alasan. Untuk target yang tidak tercapai, wajib menyertakan upaya yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2018-2023. Dengan demikian, perlu dicantumkan kinerja politik kepala daerah (pancakarsa) hingga tahun 2023, sebagaimana format Tabel. 2.2.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan (diisi nama Perangkat Daerah) Menginformasikan pencapaian kinerja perangkat daerah, dengan rincian:

- Penjelasan naratif ketercapaian IKU tujuan dan sasaran (impact) Tahun 2022 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian IKU (tujuan dan sasaran) Tahun 2022 terhadap capaian Tahun 2021, jika memiliki IKU yang sama.
- Penjelasan naratif ketercapaian target program (outcome) Tahun 2022 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian outcome Tahun 2023 terhadap capaian Tahun 2021 jika memiliki outcome yang sama. Dituangkan pada Tabel 2.3 dengan format sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (Perangkat Daerah)

Bagian ini mengulas/menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Dalam hal ini, menguraikan kinerja program yang perlu ditingkatkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, karena belum mencapai target.
- Uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam hal ini uraikan rumusan permasalahan dalam bentuk poin.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam hal ini, uraikan poin isu strategis perangkat daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program/kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda Dituangkan pada Tabel 2.4 dengan format sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, seperti perangkat daerah perbatasan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dituangkan pada Tabel 2.5 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab III. Tujuan dan Sasaran (Diisi nama Perangkat Daerah)

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Bagian ini berisi telaahan keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Barat dengan kewenangan (perangkat daerah), dengan memedomani program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2024-2026. Dituangkan pada Tabel 3.1 dan 3.2 dengan format sebagaimana terlampir Disamping itu, telaahan ini berisi dukungan terhadap kebijakan nasional lingkup vertikal yang ditetapkan akan dilaksanakan di tahun 2024 dan wajib menjadi rujukan perangkat daerah untuk dilaksanakan sesuai kewenangan perangkat daerah. Dituangkan pada Tabel 3.3 dengan format sebagaimana terlampir
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah beserta indikatornya sebagaimana telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dituangkan pada Tabel 3.4 dengan format sebagaimana terlampir Sebagai penjelasan, tujuan perangkat daerah adalah apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahunan, sebagai implementasi dari sasaran daerah. Tujuan dijabarkan dalam target tahunan, untuk kurun waktu tiga tahun yaitu Tahun 2024-2026. Adapun sasaran perangkat daerah adalah implementasi tujuan tahunan perangkat daerah yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, serta menghasilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sub bagian ini menjelaskan kondisi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendukung dilaksanakannya program, kegiatan dan sub kegiatan, seperti:
 - a. Pencapaian SDG's,
 - b. Pengentasan kemiskinan,
 - c. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - e. Pengembangan daerah terisolir, dan faktor lainnya.
2. Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024. Dituangkan pada Tabel 3.5 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan dan menguraikan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024 berdasarkan:

- a. Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 (untuk Rancangan Awal gunakan Rancangan Renstra Tahun 2024-2026).
- b. RKPD Tahun 2024 (Renja PD memedomani substansi sebagaimana tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024) Dituangkan pada Tabel 4.1 dengan format sebagaimana terlampir.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA Tahun Anggaran 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

2.1 Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023

Pada Tahun 2023, BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor memiliki 1 (satu) Tujuan, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas, dan 2 (dua) Sasaran Kinerja yang harus diwujudkan, yaitu: (1) Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dan (2) Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor Tahun 2023 melaksanakan 4 (empat) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 95 (Sembilan Puluh Lima) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 32.705.379.723 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.126.870.901 (tiga puluh dua milyar seratus dua enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan tratus satu rupiah).

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai Rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 100% maka termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi dan Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Anggaran SKPD sebesar 98.23%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengembangan Data/Informasi										
	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya data pada SIPD online kemendagri	sistem	1							
	Pengembangan dan Pengelolaan SIMPEL/ SIMRAL	Terpaduserasinya perencanaan dan penganggaran kabupaten bogor	sistem	1							
	Pengembangan dan Pengelolaan CYBORG	tersedianya sistem multifungsi	sistem	1							
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah										
	Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor	Sinerginya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor	Buku	10							
	Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO	Tersedianya Sistem Managemen yang berbasis SMM ISO	Buku	10							
	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD sinergi perencanaan pembangunan dengan provinsi sinergi perencanaan pembangunan dengan Nasional	%	100							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Perumusan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedianya Pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Dokumen	2							
	Perumusan dan Penyusunan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Tersusunnya Dokumen Jankin Perangkat Daerah	Dokumen	2							
	Perumusan dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD	Tersedianya usulan program/kegiatan Tahun 2019 tingkat Kabupaten Bogor	Dokumen	2							
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten	Jumlah dokumen musrenbang Kabupaten Tahun 2019	Dokumen	1							
	Pengendalian Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan	Dokumen	1							
	Penyusunan Pedoman Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Terkendalinya rincian kebutuhan belanja perangkat daerah secara efektif, efisien dan tepat sesuai target kinerja yang di tetapkan	Dokumen	2							
	Perumusan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Jankin Perangkat Daerah	Dokumen	2							
	Penyusunan Pedoman Renja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya proses penyusunan Renja PD sampai terwujud dokumen Penetapan Renja PD	Dokumen	2							
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berjangka	Terfasilitasinya proses penyusunan Renja PD sampai terwujud dokumen Penetapan Renja PD	Dokumen	2							
	Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen yang menjadi pedoman penyusunan Perencanaan Kabupaten Bogor	Dokumen	1							
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1							
	Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR	Terlaksananya Sinergitas CSR	Dokumen	2							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Bahan Perencanaan Sektor PSDA	%	100							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tersedianya Bahan Dokumen Perencanaan Sektor Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dokumen	3							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Tersedianya Perencanaan Subid Penanaman Modal, Kabudayaan dan Pariwisata	Dokumen	2							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha	Tersedianya bahan perencanaan lingkup koperasi, Usaha kecil menengah, Perdagangan dan perindustrian	Dokumen	2							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tersedianya bahan pengendalian dan hasil monitoring lingkup ketahanan pangan dan pertanian	Dokumen	2							
	Penyusunan bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Tersedianya Bahan Pelaporan dan Hasil Monitoring Lingkup Penanaman Modal, Kabudayaan dan Pariwisata	Dokumen	2							
	Penyusunan bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Investasi dan Dunia Usaha	Tersedianya Bahan Pelaporan dan hasil monitoring lingkup investasi dan dunia usaha	Dokumen	2							
	Perencanaan Peningkatan Daya Saing Pariwisata	Tersedianya bahan dokumen perencanaan daya saing pariwisata	Dokumen	2							
	Koordinasi perencanaan Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kecamatan sektor Primer dan Sekunder Tingkat Zona	Tersedianya Dokumen perencanaan daya saing komoditas unggulan Primer dan sekunder tingkat zona	Dokumen	3							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Komoditas Hortikultura Unggulan	Terarahnya perencanaan pengembangan komoditas hortikultura unggulan	Dokumen	2							
	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Geopark di Kabupaten Bogor	Tersedianya Dokumen rencana aksi Pengembangan Geopark	Dokumen	2							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan	3							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Tersedianya bahan perencanaan sub bidang pemerintahan	Dokumen	1							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Kesehatan dan Sosial	Tersedianya Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga	Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif bidang pendidikan, m tenaga kerja, pemuda dan olahraga	Dokumen	1							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Dokumen	1							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Kesehatan dan Sosial	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen	1							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga	Tersedianya Bahan Pelaporan dan hasil monitoring sektor pendidikan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga	Dokumen	1							
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gizi Buruk	Terpenuhinya acuan pelaksanaan rencana aksi daerah penanganan gizi buruk	Dokumen	1							
	Penilaian Anugerah Pancaniti Apik	Terpilihnya desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Dokumen	1							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesejahteraan Sosial (Sektor Pendidikan)	Tersusunnya rencana induk bidang sosial	Dokumen	1							
	Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten bogor	Dokumen	1							
	Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	Tersusunnya rencana aksi daerah (RAD) penangulungan kemiskinan terpadu kabupaten bogor tahun 2019-2023 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor	Dokumen	1							
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Bahan Perencanaan Sektor Infrastruktur dan wilayah	Kegiatan	2							
	Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Jaringan Kabupaten Bogor	Terwujudnya Sinergi Perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah Sektor Pemukiman dan Perumahan	Dokumen	10							
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif sektor pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen	3							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan	Tersedianya Bahan Pelaporan dan hasil monitoring sektor penataan ruang dan Perhubungan	Dokumen	5							
	Penyusunan bahan analisis perencanaan sub bidang permukiman dan perumahan	Tersedianya Bahan Pelaporan dan Hasil Monitoring sektor Permukiman dan Perumahan	Dokumen	2							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Permukiman dan Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif sektor pengembangan wilayah	Dokumen	2							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	Tersedianya Bahan Perencanaan Sektor Pengembangan Wilayah	Dokumen	2							
	Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian Sub Bidang Pengembangan Wilayah	Tersedianya Bahan Pelaporan dan Hasil Monitoring Sektor Pengembangan Wilayah	Dokumen	2							
	Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan	Kegiatan	5							
	Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran	Tersedianya Dokumen LKPJ	Dokumen	1							
	Pengendalian Pelaksanaan TJSL di Kabupaten Bogor	Terlaksananya Pengendalian TJSL	Dokumen	1							
	Penyusunan LKPJ AMJ	Tersedianya Dokumen LKPJ AMJ	Dokumen	1							
	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kabupaten Bogor	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	4							
	Evaluasi Pelaksanaan Non APBD	Terlaksananya Evaluasi Non APBD	Dokumen	1							
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan	6							
	Difusi Hasil Penelitian dan Inovasi	Tersedianya Singkronisasi bahan kajian perencanaan	Dokumen	3							
	Kajian pengembangan di Geopark di Kabupaten Bogor	Tersedianya Dokumen Geopark Kabupaten Bogor	Dokumen	5							
	Pengembangan Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor	Tersedianya Dokumen Jarlit Kabupaten Bogor	Lembaga	15							
	Analisis IPM di 40 Kec. Di Kabupaten Bogor	Tersedianya Data IPM di 40 Kecamatan	Dokumen	10							
	Analisis Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya Data Indikator Makro	Dokumen	3							
	Penyusunan Evaluasi Pencapaian Target SDG's	Terukurnya hasil pencapaian sasaran MDG's	Dokumen	1							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat	Kegiatan	1							
	Gelar Inovasi Daerah	Terselenggaranya Inovasi Keunggulan Lokal Daerah	Kali	5							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	4							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		Unit	17							
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan kebersihan kantor	Gedung	2							
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan alat tulis kantor	Bidang	6							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan barang cetak dan pengadaan	Bidang	6							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	13							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	aparatur dapat mengakses informasi/berita dan memahami peraturan Per-UU	Aparatur	90							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan bahan logistik kantor	Jenis	4							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	terjamunya tamu kantor dan peserta rapat kantor	Orang	400							
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	terwujudnya kelancaran koordinasi dengan instansi terkait	Kali	127							
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	Dokumen	106							
	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	terwujudnya keamanan dilingkungan kantor	Orang	10							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kegiatan	9							
	Pengadaan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Jenis	9							
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Unit	19							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi		Unit	1							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya umur ekonomis bangunan	Gedung	1							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya umur teknis kendaraan dinas/operasional	Unit	18							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung kantor	Unit	110							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung kantor	Jenis	4							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penataan Taman Kantor	Tertatanya taman lingkungan kantor	Dokumen	1							
	Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor	Tertata Ruangan Gedung kantor	Gedung	1							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kegiatan	2							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peserta memahami materi sosialisasi	Orang	12							
	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	terwujudnya kesehatan mental dan rohani	Kali	11							
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah	Kegiatan	3							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah	Dokumen	6							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan semesteran perangkat daerah	Dokumen	2							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan akhir tahun perangkat daerah	Dokumen	1							
	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Terarahnya dokumen perencanaan tahun 2018 dan tahun 2018 serta perubahan 2018	Buku	60							
	Penatausahaan Keuangan SKPD	terwujudnya tertib administrasi keuangan bulanan	Dokumen	12							

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Teridentifikasinya kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan	Dokumen	6							
	Publikasi Kinerja SKPD	terwujudnya transparasi SKPD	Kali	24							
	Penyusunan Renja SKPD	Terarahnya rencana kerja tahunan SKPD	Dokumen	2							
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Tersedianya data dan informasi Pendukung Perencanaan Kelembagaan	Dokumen		5						
	Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor	Sinerginya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor	Dokumen		6						
	Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO	Tersedianya sistem manajemen yang berbasis SMM ISO	Dokumen		6						
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD	%		100						
	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah panduan	Buku		5						
	Pengembangan dan Pengelolaan SIMPEL/ SIMRAL	Jumlah sistem yang dikembangkan	Sistem		1						
	Pengembangan dan Pengelolaan CYBORG	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	Sistem		1						
	Penyusunan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah	Panduan kegiatan	Buku		5						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%		100						
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd)	Tersedianya pedoman dokumen RKPD tahun 2020	Dokumen		1						
	Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd Kabupaten	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah kepada kepentingan	Perangkat Daerah		72						
	Penyusunan Pedoman Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd Di Kecamatan	Tersedianya usulan perencanaan yangh bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan RKPD di tingkat kecamatan	Dokumen		1						
	Penyusunan Pedoman Dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya proses penyusunan renja dan renstra PD sampai terwujud dokumen penetapan Renja dan Renstra PD	Perangkat Daerah		76						
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berjangka	Tersedianya dokumen berjangka kabupaten bogor sebagai acian perencanaan pembangunan	Dokumen		2						
	Penyusunan Pedoman Dan Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Tersedianya pedoman perencanaan pendaan pembangunan Kabupaten Bogor	Bulan		12						
	Perencanaan Pembangunan Berbasis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Hidup (Tjsl)	Tersedianya data/informasi pelaksanaan TJSL di Kabupaten Bogor	Dokumen		3						
	Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	Kegiatan		4						
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (Lkpi)	Terpenuhinya pelaporan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah	Dokumen		1						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Berjangka	Terevaluasinya dokumen perencanaan berjangka kabupaten bogor	Jenis		3						
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Kabupaten Bogor	Terevaluasinya hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		4						
	Evaluasi Hasil Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non Apbd Kabupaten Bogor	Tersusunnya dokumen evaluasi pendanaan non APBD	Dokumen		2						
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Tersedianya bahan perencanaan sektor PSDA	%		100						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Tersedianya bahan dokumen perencanaan lingkup sub bidang ketahanan pangan dan pertanian	Dokumen		4						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Tersedianya bahan dokumen evaluasi perencanaan bidang ekonomi	Dokumen		4						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Penanaman Modal, Kebudayaan Dan Pariwisata	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen		1						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Penanaman Modal, Kebudayaan Dan Pariwisata	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi lingkup penanaman modal kebudayaan dan pariwisata	Dokumen		1						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian	Tersedianya perencanaan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Bulan		12						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan perindustrian	Tersedianya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Bulan		12						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Perencanaan Peningkatan Daya Saing Pariwisata	Tersedianya bahan Dokumen perencanaan sektor pariwisata tingkat destinasi	Dokumen		1						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perkebunan	Tersedianya bahan dokumen perencanaan tanaman perkebunan	Dokumen		2						
	Perencanaan Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kecamatan Sektor Primer Tingkat zona	Tersedianya bahan dokumen perencanaan komoditas unggulan tingkat zona	Dokumen		1						
	Perencanaan Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kecamatan Sektor Sekunder Dan tersier	Terwujudnya pelaksanaan daya saing unggulan kecamatan sektor sekunder dan primer	Dokumen		1						
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023	Tersedianya dokumen rencana Induk pembangunan dan ekonomi (RIPE)	Dokumen		1						
	Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Ekowisata Di Kabupaten Bogor	Tersedianya pedoman dalam perencanaan pengembangan pariwisata tingkat destinasi di kabupaten bogor	Dokumen		1						
	Penyusunan Dokumen Panduan Perencanaan Lingkup Perekonomian Dan Sumberdaya Alam	Tersedianya bahan dokumen perencanaan tanaman holtikultura	Dokumen		1						
	Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Tersedianya bahan Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan		3						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda Dan olahraga	Terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang pendidikan tenaga kerja pemuda dan olahraga sebagai acuan perencanaan jangka panjang	Dokumen		1						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Kesehatan Dan Sosial	Terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang kesehatan dan sosial sebagai acuan perencanaan tahunan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen		1						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Pemerintahan	Terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang pemerintahan sebagai acuan perencanaan tahunan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen		1						
	Penanganan Kemiskinan Daerah (Tkpkd)	Rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten bogor	Dokumen		1						
	Penyusunan Rencana Induk Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah sektor keolahragaan sebagai bahan acuan pelaksanaan program/kegiatan sektor keolahragaan	Dokumen		1						
	Penilaian Anugrah Pancaniti Apik	Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan tingkat desa yang baik	Dokumen		1						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda Dan Olahraga	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pelaporan	Dokumen		1						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Kesehatan Dan Sosial	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan palaporan	Dokumen		1						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pemerintahan	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaankegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen		1						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pengobatan Tradisional Fisioterapi cimande	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan pengobatan tradisional fisioterapi cimande kabupaten bogor	Dokumen		1						
	Penguatan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Terpilihnya komunitas atau lembaga masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan untuk diajak berkolaborasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan	Dokumen		1						
	Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya bahan perencanaan sektor insprastruktur dan wilayah	Kegiatan		8						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen		29						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Permukiman Dan Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkup permukiman dan perumahan	Dokumen		46						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Pengembangan Wilayah	Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pengembangan wilayah	Kecamatan		40						
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pengembangan Wilayah	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang pengembangan wilayah	Kecamatan		40						
	Pengembangan Dan Pengelolaan Simpul Jaringan Kabupaten Bogor	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang optimal di kabupaten berbasis data dan informasi yang handal	Dokumen		3						
	Pemutakhiran Data Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (Rpjlm)	Terencananya program/kegiatan 5 tahunan bidang keciptakarya	Dokumen		2						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen		48						
	Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Lingkup Permukiman dan Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkup permukiman dan perumahan	Dokumen		46						
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan		6						
	Analisis IPM di 40 Kecamatan di kabupaten Bogor	Meningkatnya nilai IPM 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai dasar perencanaan	Kecamatan		40						
	Analisis Indikator Ekonomi Daerah	Terpenuhinya data dan informasi tentang indikator ekonomi daerah kabupaten bogor berupa PDRB kabupaten, PDRB Kecamatan, PDRB skala usaha UMKM, LPE, IHK, NTP Perbankan	Dokumen		1						
	Penyusunan Evaluasi Pencapaian Target Sustainable Development Goals (Sdg's)	Dokumen evaluasi SDG's Sebagai bahan pedoman perencanaan	Tahun Anggaran		1						
	Sosialisasi Pembangunan & Pengembangan Geopark Di Kabupaten Bogor	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Geopark, terjaganya kelestarian alam di kabupaten bogor	Kawasan Geopark		1						
	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang diterapkan oleh masyarakat Terselenggaranya inovasi keunggulan lokal daerah	Kegiatan		2						
	Gelar Inovasi Daerah	Terselenggaranya gelar inovasi daerah karya inovasi terbaik	Kategori		6						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Terpetakannya rencana aksi Sida potensi jumlah inovasi, jenis, lokasi dan daya dukung			1						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan		14						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis		4						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit		24						
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan kebersihan kantor	Orang		12						
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan alat tulis kantor	Jenis		2						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan barang cetakan dan penggandaan	Jenis		3						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis		13						
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	aparatur dapat mengakses informasi/berita dan memahami peraturan per-UU	Jenis		6						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan bahan logistik kantor	Jenis		3						
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terjamunya tamu kantor dan peserta rapat dengan baik	Orang		4000						
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan Instansi terkait	Kali		174						
	Penyediaan Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd	Terwujudnya tertib administrasi Dokumen Dan Arsip	Dokumen		12						
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	Dokumen		106						
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Terwujudnya tertib administrasi Barang PD	Dokumen		12						
	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor	Orang		11						
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor	Kegiatan		7						
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit		2						
	Pengadaan Peralatan Kantor	Terwujudnya Pelaksanaan Tupoksi Aparatur	Jenis		8						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya umur ekonomis bangunan	Geudng		1						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya umur ekonomis jaringan komputerisasi	Jaringan		1						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya umur teknis kendaraan Dinas /Operasional	Unit		18						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung Kantor	Unit		145						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya umur teknis peralatan gedung Kantor	Jenis		3						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kegiatan		1						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peserta memahami materi sosialisasi	Orang		130						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan		2						
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta memahami materi sosialisasi	Orang		12						
	Pembinaan Mental Dan Rohani Bagi Aparatur	Terwujudnya kesehatan mental dan rohani	Kali		96						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem 'Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Terwujudnya Akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja perangkat daerah	Dokumen		12						
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terwujudnya Akuntabilitas Pertanggung jawaban keuangan semesteran perangkat daerah	Dokumen		2						
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan akhir tahun perangkat daerah	Dokumen		2						

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Terarahnya dokumen perencanaan tahun 2019 dan tahun 2020 serta perubahan tahun 2019	Dokumen		5						
	Penatausahaan Keuangan Skpd	Terwujudnya auntabilitas pertanggung jawaban keuangan akhir tahun perangkat daerah	Dokumen		12						
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Skpd	Teridentifikasinya kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan	Dokumen		12						
	Publikasi Kinerja Skpd	Terwujudnya transparasi kinerja SKPD	Kali		24						
	Penyusunan Rencana Kerja Skpd	Terarahnya rencana kerja tahunan PD	Dokumen		2						
	Penyusunan Rencana Strategis Skpd	Terarahnya rencana kerja lima tahunan PD	Dokumen		1						
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%			100					
	Penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)	Tersedianya pedoman dokumen RKPD Tahun 2020	Dokumen			1					
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan	Perangkat Daerah			72					
	Penyusunan pedoman dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang RKPD di Kecamatan	Tersedianya usulan perencanaan yang bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan RKPD di tingkat kecamatan	Dokumen			1					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan perencanaan pembangunan berjangka	Tersedianya Dokumen berjangka kabupaten bogor sebagai acuan perencanaan pemabngunan	Dokumen			2					
	penyusunan pedoman dan fasilitasi perencanaan pendanaan pembangunan	Tersedianya pediman perencanaan pendanaan pembangunan kabupaten bogor	Bulan			12					
	Perencanaan pembangunan berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)	Tersedianya data/informasi pelaksanaan TJSL di Kabupaten Bogor	Dokumen			3					
	PROGRAM OENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%			100					
	Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	tersedianya data pada SIPD online kemendagri sebagaimana amanat permendagri 8/2014	Kelompok Data			8					
	Pengembangan dan pengelolaan SIMPEL/SIMRAL	Terpaduserasinya penganggaran kabupaten	Perangkat Daerah			72					
	Pengembangan dan pengelolaan CYBORG	Tersedianya sistem multifungsi	Sistem			2					
	Penyusunan data pokok perencanaan pemabngunan daerah	Tersedianya dokumen data pokok dan infomasi perencanaan pemabngunan	Dokumen			1					
	PROGRAM EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%			90					
	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	terpenuhinya pelaporan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah	Dokumen			1					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Evaluasi hasil perencanaan pembangunan berjangka	terevaluasinya dokumen perencanaan berjangka kabupaten bogor	Jenis			3					
	evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan kabupaten bogor	terevalasinya hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen			4					
	Evaluasi hasil perencanaan pendanaan pembangunan non APBD	Tersusunnya dokumen evaluasi pendanaan non APBD	Dokumen			2					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan			11					
	Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pendidikan tenaga kerja, pemuda dan olahraga	terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang pendidikan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga sebagai acuan perencanaan jangka panjang	Dokumen			1					
	penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup kesehatan dan sosial	terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang kesehatan dan sosial sebagai acuan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen			1					
	penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pemerintahan	terpenuhinya bahan perencanaan sub bidang pemerintahan sebagai acuan perencanaan tahunan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen			1					
	penanganan kemiskinan daerah (TKPKD)	rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten bogor	Dokumen			1					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	penyusunan rencana induk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah sektor keolahragaan sebagai bahan acuan pelaksanaan program/kegiatan sektor keolahragaan	Dokumen			1					
	Penilaian anugrah pancaniti apik	Terpenuhinya perencanaan pembangunan tingkat desa yang baik	Dokumen			1					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pendidikan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga	Tersedianya dokumen pengndalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pemabangunan dan pelaporan	Dokumen			1					
	pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup kesehatan dan sosial	tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen			1					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pemerintahan	tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen			1					
	Penyusunan rencana induk oengembangan kawasan pengobatan tradisional fisioterapi Cimande	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan pengobatan tradisional fisioterapi cimande Kabupaten Bogor	Dokumen			1					
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	TERSEDIANYA BAHAN PERENCANAAN SEKTOR PSDA	%			100					
	Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup ketahanan pangan dan pertanian	tersedianya bahan dokumen perencanaan lingkup sub bidang ketahanan pangan dan pertanian	Dokumen			4					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup ketahanan pangan dan pertanian	Tersedianya bahan dokumen evaluasi perencanaan bidang ekonomi	Dokumen			4					
	penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen			1					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup penanaman modal kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi lingkup penanaman modal kebudayaan dan pariwisata	Dokumen			1					
	Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Tersedianya perencanaan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Bulan			12					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Tersedianya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi lingkup koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian	Bulan			12					
	Perencanaan peningkatan daya saing pariwisata	Tersedianya bahan dokumen perencanaan sektor pariwisata tingkat destinasi	Dokumen			1					
	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan perkebunan	Tersedianya bahan dokumen perencanaan tanaman perkebunan	Dokumen			1					
	Perencanaan peningkatan daya saing komoditas unggulan kecamatan sektor primer tingkat zona	Tersedianya bahan dokumen perencanaan komoditas unggulan tingkat zona	Dokumen			2					
	Perencanaan peningkatan daya saing komoditas unggulan kecamatan sektor sekunder dan tersier	Terwujudnya pelaksanaan daya saing unggulan kecamatan sektor sekunder dan primer	Dokumen			1					
	Penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kabupaten bogor tahun 2019-2023	Tersedianya dokumen rencana induk pembangunan dan ekonomi (RIPE)	Dokumen			1					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penyusunan rencana pengembangan destinasi pariwisata ekowisata di kabupaten bogor	Tersedianya pedoman dalam perencanaan pengembangan pariwisata tingkat destinasi di kabupaten bogor	Dokumen			1					
	Penyusunan dokumen panduan perencanaan lingkup perekonomian dan sumber daya alam	Tersedianya bahan dokumen perencanaan tanaman hortikultura	Dokumen			1					
	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DDAN SUMBER DAYA ALAM	TERSEDIANYA BAHAN PERENCANAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH	KEGIATAN			7					
	Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen			29					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan	Dokumen			48					
	Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup permukiman dan perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkup sub bidang permukiman dan perumahan	Dokumen			46					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup permukiman dan perumahan	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang permukiman dan perumahan	Dokumen			45					
	Penyusunan bahan analisis perencanaan lingkup pengembangan wilayah	Tersedianya bahan analisis perencanaan sub bidang pengembangan wilayah	Kecamatan			40					
	Pengendalian dan evaluasi kegiatan lingkup pengembangan wilayah	Tersedianya bahan monitoring dan pengendalian sub bidang pengembangan wilayah	Kecamatan			40					
	Pengembangan dan pengelolaan simpul jaringan kabupaten bogor	Terwujudnya perencanaan pemabngunan yang optimal di kabupaten berbasis data dan informasi yang handal	Dokumen			3					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pemutakhiran data dokumen rencana program onvestasi jangka menengah (RPIJM)	Terencananya program/kegiatan 5 tahunan bidang keciptakayaan	Dokumen			2					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEGIATAN			6					
	Penguatan jaringan penelitian bidang peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan	Terbentuknya jejaring penelitian dan terjalinnya hubungan kerjsama antara perangkat daerah di kabupaten bogor dengan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) serta perguruan tinggi di jabodetabek	Perguruan Tinggi			15					
	Analisis IPM di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor	Meningkatnya nilai IPM 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai dasar perencanaan	Kecamatan			40					
	Analisis indikator Ekonomi Daerah	Terpenuhinya data dan informasi tentang indikator ekonomi daerah kabupaten bogor berupa PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan, PDRB Skala Usaha UMKM, LPE, IHK, NTP, Perbankan	Dokumen			1					
	Penyusunan Evaluasi pencapaian target sustainable Development Goals (SDG'S)	Dokumen evaluasi SDG's sebagai bahan pedoman perencanaan	Tahun Anggaran			1					
	Sosialisasi pembangunan dan pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Geopark, terjaganya kelestarian alam di Kabupaten Bogor	Kawasan Geopark			1					
	PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	JUMLAH INOVASI YANG DITERAPKAN OLEH MASYARAKAT	KEGIATAN			2					
	Gelar Inovasi Daerah	Terselenggaranya gelar inovasi daerah	Kategori			6					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Road Map Sistem inovasi daerah (SIDa)	Terpetakannya rencana aksi SIDa, potensi, jumlah inovasi, jenis, lokasi, dan daya dukung	Tahun Angaran			1					
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SEKRETARIAT	%			80					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	jenis			4					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah buku per-UU, surat kabar dan majalah yang tersedia	jenis			6					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis			4					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah jamuan rapat rapat	kali			4000					
	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	dokumen pengelolaan administrasi barang	dok			12					
	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	jenis dan jumlah dokumen arsip yang di tata	dokumen			12					
	Pengelolaan Keamanan Kantor	jumlah petugas keamanan kantor	orang			8					
	Pengelolaan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	orang			16					
	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	unit			14					
	Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor	Jumlah dokumen perencanaan Tim Komite Perencana Kabupaten Bogor	dokumen			3					
	Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO	dokumen legalitas Standar Sertifikat Internasional	dokumen			1					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	unit			4					
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	jenis			2					
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis dan cetakan kantor yang tersedia	jenis			4					
	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis			9					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	gedung			1					
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperlihara	unit			27					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperlihara	jenis			3					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		jenis			3					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara	jaringan			1					
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke dalam dan luar daerah	kali			150					
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	jumlah ahli daya pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	orang			29					
	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian	kali			92					
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen			130					
	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	jumlah peserta pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur	orang			10					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan	jumlah hasil pelaporan keuangan daerah	dokumen			3					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	dokumen			12					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja perangkat daerah	dokumen			6					
	Penyusunan Perencanaan Anggaran	jumlah kegiatan perencanaan yang dilaksanakan perangkat daerah	dokumen			5					
	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan tahunan dan laporan forum PD, penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten	dokumen			3					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan perencanaan perangkat daerah	kegiatan			5					
	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah publikasi kinerja Bappedalitbang	kali			25					
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan	%				100	100	100	100	100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen				5	5	5	5	100
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen pendukung analisis perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen				1	1	3	3	100
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen perencanaan dan pengelolaan TJSL Kabupaten Bogor	Dokumen				1	1	3	3	100
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang Ditandatangani	Dokumen				1	1	1	1	100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Panduan Pelaksanaan Forum PD	Dokumen				1	1	1	1	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD yang di tanda tangani	Dokumen				1	1	1	1	100
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Panduan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Dokumen				1	1	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Dokumen				3	3	3	3	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	%				100	100	100	100	100
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Dokumen				1	1	1	1	100
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi	Dokumen				1	1	1	1	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			Urusan Unsur	3 5	3 5	3 5	3 5	100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				2	2	2	2	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen				3	3	3	3	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	%				100	100	100	100	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah				21	21	21	21	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				3	3	3	3	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Daerah Lingkup Pemerintahan	Dokumen				3	3	3	3	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan	Perangkat Daerah				21	21	21	21	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan	Dokumen				1	1	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kesehatan dan Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				3	3	3	3	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan dan Sosial	Dokumen				3	3	3	3	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan dan Sosial	Dokumen				3	3	3	3	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pembangunan Manusia	Dokumen				1	1	1	1	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perangkat Daerah				7	7	7	7	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Mengengan, Perdagangan dan Perindustrian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				3	3	3	3	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Mengengan, Perdagangan dan Perindustrian	Dokumen				3	3	3	3	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Koperasi, Usaha Kecil Mengengan, Perdagangan dan Perindustrian	Dokumen				21	21	21	21	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perekonomian	Dokumen				6	1	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				3	3	3	3	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen				3	3	3	3	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen				21	21	21	21	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	Dokumen				1	1	1	1	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diarahkan dalam penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat Daerah				43	43	43	43	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				9	1	1	1	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dokumen				11	1	1	1	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dokumen				21	1	1	1	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Infrastruktur	Dokumen				3	1	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen				9	1	1	1	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen				18	1	1	1	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen				21	1	1	1	100
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kewilayahan	Dokumen				3	1	1	1	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%				100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian Bidang Sosial dan kependudukan	%				100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen				12	3	3	3	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	%				100				
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen kajian Koperasi Usaha kecil dan menengah	Dokumen				6				
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen kajian Perindustrian dan perdagangan	Dokumen								
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen					2	2	2	100
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Hidup	Dokumen								
	Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen kajian Penataan ruang dan pertanahan	Dokumen								
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen kajian Perhubungan	Dokumen								
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	%				100	100	100	100	100
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah	Dokumen				3	1	1	1	100
	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikas dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah difusi inovasi dan penerapan teknologi	Inovasi				3				
	diseminasi jenis, prosedur dan metoda penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Jumlah diseminasi inovasi Daerah	Dokumen				3	1	1	1	100
	sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan Diseminasi Hasil Penelitian dan pengembangan	Dokumen				3	3	3	3	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen				7	7	7	7	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen				4	3	3	3	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah	Dokumen				3	1	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD					3	1	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perangkat daerah	Dokumen				6	2	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Perangkat daerah	Dokumen				6	2	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian kinerja PD	Dokumen				21	7	7	7	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Dokumen				17	17	17	17	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangam perangkat daerah	Dokumen				36	12	12	12	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan Yang dibayarkan untuk ASN PD	Bulan				14	14	14	14	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah	Laporan				12	12	12	12	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kordinasi dan Pelporan Akuntasi PD	Laporan				12	12	12	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Akhir Tahunan PD	Dokumen				1	1	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan, Semesteran dan triwulan SKPD	Dokumen				17	17	17	17	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis PD	Dokumen				2	2	2	2	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah	Dokumen				6	6	6	6	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milk Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah	Dokumen				6	6	6	6	100
	pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian barang	Dokumen				1	1	1	1	100
	rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen Rekon dan laporan barang	Dokumen				5	5	5	5	100
	penataan barang milik daerah pada SKPD	dokumen laporan barang	Dokumen				2	2	2	2	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				100	100	100	100	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Atribut Pegawai	Buah				150	150	150	150	100
	Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Stel				150	150	150	150	100
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Dokumen pengelolaan pegawai	Dokumen				12	12	12	12	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Laporan koordinasi Simpeg	Bulan				12	12	12	12	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Fasilitasi Kegiatan Monev Kinerja Pegawai	Bulan				36	37	37	37	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang				9	9	9	9	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali				2	2	2	2	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kali				2	2	2	2	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan umum PD	Layanan				10	10	10	10	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis				7	7	7	7	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit				6	6	6	6	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	Jenis				25	25	25	25	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	Jenis				4	4	4	4	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak	Jenis				16	13	13	13	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	Eksemplar				13520	13520	13520	13520	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan Makanan dan minuman	Porsi				7823	3650	3650	3650	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan keluar Daerah	Kali				279	434	434	434	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Dokumen Arsip SKPD	Dokumen				12	12	12	12	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE	Dokumen				1	1	1	1	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang yang diadakan	Unit				8	8	8	8	100
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit				5	2	2	2	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit				36	2	2	2	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Mesin lainnya	Unit				2	2	2	2	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & prasarana gedung Kantor	Unit				6	6	6	6	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & prasarana pendukung Bangunab Kanrtor	Unit				2	4	4	4	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	Layanan				24	8	8	8	100
	Penyedia Jasa surat menyurat	Jumlah Benda pos	Jaringan				750	712	712	712	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah Jaringan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Paket				4	5	5	5	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Orang				1	1	1	1	100
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga tenaga Keamanan	Orang				28	28	28	28	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang di pelihara	Jenis				30	10	10	10	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas yang di pelihara dan dibayar pajaknya	Unit				20	25	25	25	100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(GR AND OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI(%)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	pemeliharaan mebel	jumlah mebel yang dipelihara	Unit				11	20	20	20	100
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer,	Unit				125	118	118	118	100
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor Rehab Gedung kantor Renovasi Ruang kerja Pemeliharaan taman yang terpelihara	M2				1120	532	532	532	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terpelihara	Unit				80	38	38	38	100
	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan	jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit				6	9	9	9	100

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator program sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Tahun 2023 dari 4 (empat) indikator program, seluruhnya mencapai target yang diharapkan, yaitu :

- (1) Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan, mencapai target 100%;
- (2) Tingkat kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan, mencapai target 100%;
- (3) Persentasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah mencapai target 100%
- (4) Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, mencapai target 100%;

Dari 4 Program dan 18 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan, antara lain:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 22.375.840.328,00 (98,24%) dari total anggaran Rp. 22.776.679.849,00, dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 9 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 511.642.865,00 (97,37%) dari total anggaran Rp.501.127.533 dan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 241.503.555,00 (98,26%) dari total anggaran Rp.245.777.863 dengan realisasi fisik 100,00%;
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.861.020,00 (90,28%) dari total anggaran Rp.16.460.458 dengan realisasi fisik masih 100,00%;
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.066.545,00 (96,46%) dari total anggaran Rp.15.619.546 dengan realisasi fisik masih 100,00%;

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.202.780,00 (97,23%) dari total anggaran Rp. 27.976.670,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.920.494,00 (97,65%) dari total anggaran Rp. 28.593.636,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 72.940.480,00 (95,52%) dari total anggaran Rp. 76.361.194,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 112.147.991,00 (97,80%) dari total anggaran Rp. 114.675.868,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 16.511.928.146,00 (98,66%) dari total anggaran Rp. 16.735.832.705,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.346.129.438,00 (98,73%) dari total anggaran Rp. 16.555.803.463,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 82.544.715,00 (94,70%) dari total anggaran Rp. 87.161.970,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.600.302,00 (91,83%) dari total anggaran Rp. 20.256.115 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.931.035,00 (88,95%) dari total anggaran Rp. 17.910.738 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar

Rp. 48.722.656,00 (89,07%) dari total anggaran Rp. 54.700.419,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar ini Rp. 27.588.950,00 (85,79%) dari total anggaran Rp. 32.157.036,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.883.200,00 (97,92%) dari total anggaran Rp. 8.050.359 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.999.000,00 (76,52%) dari total anggaran Rp. 9.146.263 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.706.750,00 (84,94%) dari total anggaran Rp. 14.960.414,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar ini Rp. 590.388.535,00 (98,45%) dari total anggaran Rp. 599.655.630,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 13.588.600,00 (90,12%) dari total anggaran Rp. 15.077.519 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 209.555.025,00 (98,76%) dari total anggaran Rp. 212.190.013,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Sosialisasi Peraturan Perundang Perundangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 70.559.000 (97,87%) dari total anggaran Rp. 72.094.864 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar

Rp.296.685.910 (98,80%) dari total anggaran Rp.300.293.234 dengan realisasi fisik 100,00%;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.410.030.979,00 (96,34%) dari total anggaran Rp. 1.463.653.561,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.90.595.800 (95,79%) dari total anggaran Rp.94.582.446 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 236.195.000 (94,94%) dari total anggaran Rp. 248.790.766 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.218.078.300 (99,81%) dari total anggaran Rp.218.495.231 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.77.631.100 (98,52%) dari total anggaran Rp.78.800.100 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.77.381.900 (69,38%) dari total anggaran Rp.111.535.409 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Fasilitas Kunjungan Tamu Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.88.966.500 (99,96%) dari total anggaran Rp.89.000.000 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.516.024.329 (99,99%) dari total anggaran Rp.516.080.000 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15.971.050 (96,10%) dari total anggaran Rp.16.619.975 dengan realisasi fisik 100,00%;

9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.89.187.000 (99,37%) dari total anggaran Rp.89.749.634 dengan realisasi fisik 100,00%;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 356.220.000,00 (97,08%) dari total anggaran Rp. 366.924.320,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Mebel Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.73.400.000 (99,12%) dari total anggaran Rp.74.048.100 dengan realisasi fisik 100,00%;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.111.600.000 (99,53%) dari total anggaran Rp.112.129.980 dengan realisasi fisik 100,00%;
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.53.280.000 (99,99%) dari total anggaran Rp.53.286.660 dengan realisasi fisik 100,00%;
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.117.940.000 (92,53%) dari total anggaran Rp.127.459.580 dengan realisasi fisik 100,00%;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.919.552.281,00 (97,83%) dari total anggaran Rp. 1.962.185.729,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.000.000 (100,00%) dari total anggaran Rp.7.000.000 dengan realisasi fisik 100,00%;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.753.816.343 (98,10%) dari total anggaran Rp.768.396.585 dengan realisasi fisik 100,00%;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.158.735.938 (97,64%) dari total anggaran Rp.1.186.789.144 dengan realisasi fisik 100,00%;

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.048.488.572,00 (96,12%) dari total anggaran Rp. 1.090.805.933,00 dengan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.234.747.883 (94,33%) dari total anggaran Rp.248.860.000 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.130.744.340 (90,43%) dari total anggaran Rp.144.577.500 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.197.190.719 (98,88%) dari total anggaran Rp.199.420.000 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.222.774.578 (95,50%) dari total anggaran Rp.233.280.950 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.263.031.052 (99,38%) dari total anggaran Rp.264.667.483 dengan realisasi fisik 100,00%;

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.216.584.491,00 (96,49%) dari total anggaran Rp. 3.333.476.063,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.406.388.105,00 (95,70%) dari total anggaran Rp. 2.514.635.355,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.475.065.765 (88,26%) dari total anggaran Rp.538.281.224 dengan realisasi fisik 100,00%;
 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.527.732.111 (96,70%) dari total anggaran Rp.545.725.296 dengan realisasi fisik 100,00%
 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.169.164.905 (97,46%) dari total anggaran Rp.173.582.452 dengan realisasi fisik 100,00%;
 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.31.330.000 (90,67%) dari total anggaran Rp.34.554.287 dengan realisasi fisik 100,00%;
 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.395.419.200 (98,84%) dari total anggaran Rp.400.044.163 dengan realisasi fisik 100,00%
 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.176.865.000 (97,13%) dari total anggaran Rp.182.093.653 dengan realisasi fisik 100,00%;
 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.630.811.124 (98,51%) dari total anggaran Rp.640.354.280 dengan realisasi fisik 100%;
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 382.422.170 (99,66%) dari total anggaran Rp.383.718.173 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.382.422.170 (99,66%) dari total anggaran Rp.383.718.173 dengan realisasi fisik 100,00%;
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 329.985.548,00 (99,66%) dari total anggaran Rp. 383.718.173,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.126.557.808 (98,38%) dari total anggaran Rp.128.635.902 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.203.427.740 (98,83%) dari total anggaran Rp.205.825.770 dengan realisasi fisik 100,00%;

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 97.788.668,00 (97,15%) dari total anggaran Rp. 100.660.863,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.788.668,00 (97,15%) dari total anggaran Rp. 100.660.863,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

C. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 4.989.577.711,00 (96,21%) dari total anggaran Rp. 5.186.390.858,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.311.879.967,00 (97,17%) dari total anggaran Rp. 1.350.085.092,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.188.143.118 (97,43%) dari total anggaran Rp.193.098.579 dengan realisasi fisik 100,00%;

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.40.894.965 (93,13%) dari total anggaran Rp.43.911.773 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.58.468.780 (93,88%) dari total anggaran Rp.62.283.283 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.280.999.350 (98,38%) dari total anggaran Rp.140.454.024 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.356.753.657 (98,53%) dari total anggaran Rp.362.086.637 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.39.279.680 (91,38%) dari total anggaran Rp.64.366.037 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.112.968.032 (96,98%) dari total anggaran Rp.116.482.172 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.234.372.385 (96,20%) dari total anggaran Rp.243.619.589 dengan realisasi fisik 100,00%;

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 924.722.220,00 (96,26%) dari total anggaran Rp.

960.638.536,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.197.999.008 (97,10%) dari total anggaran Rp.203.920.812 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.494.800 (87,32%) dari total anggaran Rp.33.778.256 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.124.542.466 (96,65%) dari total anggaran Rp.128.862.668 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.151.810.550 (96,25%) dari total anggaran Rp.157.725.437 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.148.160.221 (97,98%) dari total anggaran Rp.151.216.588 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.98.987.825 (98,30%) dari total anggaran Rp.103.868.936 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.47.833.750 (95,48%) dari total anggaran Rp.50.107.810 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.125.893.600 (65,98%) dari total anggaran Rp.131.166.030 dengan realisasi fisik 100,00%;

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.752.975.524,00 (95,73%) dari total anggaran Rp. 2.875.667.230,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.180.959.908 (97,19%) dari total anggaran Rp.186.191.895 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.55.386.000 (95,64%) dari total anggaran Rp.57.912.697 dengan realisasi fisik 100,00% ;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.35.479.434 (97,68%) dari total anggaran Rp.36.322.696 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.402.875.790 (98,78%) dari total anggaran Rp.407.848.844 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.161.943.103 (83,08%) dari total anggaran Rp.194.931.630 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.101.817.808 (82,82%) dari total anggaran Rp.122.935.360 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.62.126.653 (98,56%) dari total anggaran Rp.63.035.874 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran

belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.752.386.828 (97,01%) dari total anggaran Rp.1.806.488.234 dengan realisasi fisik 100,00%;

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.387.179.628,00 (98,46%) dari total anggaran Rp. 1.408.832.953,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kepndudukan

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 441.771.115,00 (97,99%) dari total anggaran Rp.450.848.990 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.359.684.310 98,28%) dari total anggaran Rp.365.979.932 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.82.086.805 (96,72%) dari total anggaran Rp.84.869.058 dengan realisasi fisik 100,00%;

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 323.792.228,00 (97,36%) dari total anggaran Rp. 332.564.534,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.65.166.160 (98,34%) dari total anggaran Rp.66.267.032 dengan realisasi fisik100,00%;
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.198.467.508 (96,87%) dari total anggaran Rp.204.871.851 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.60.158.560 (97,94%) dari total anggaran Rp.61.425.651 dengan realisasi fisik 100,00%;

c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 621.616.285,00 (99,39%) dari total anggaran Rp. 625.419.429,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.460.760.050 (99,44%) dari total anggaran Rp.463.346.420 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.19.647.350 (98,04%) dari total anggaran Rp.20.040.613 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.130.908.885 (99,63%) dari total anggaran Rp.131.399.189 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.300.000 (96,87%) dari total anggaran Rp.10.633.207 dengan realisasi fisik 100%;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga untuk Tahun 2019-2020 dan Tahun 2021-2023 terdapat perbedaan pada Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerjanya.

Uraian Target Capaian, Realisasi, dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara lengkap dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2018	2019	2020		2021		2022		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan										
	Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran										
	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan yang inovatif										
	Prosentase Defusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%	100	100	20	20	100	100			
	Prosentase Inovasi di Kabupaten Bogor	%	100	100	20	20	100	100	100	100	100
	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir	%					100	100	100	100	100
	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	inova si					166	199	199	221	111.06

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun (2023)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4			5
1	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100

2	Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif	Persentase Rekomendasi hasil penelitian/kajian dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan yangdi akomodir	persen	100	100	100
		Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi	239	249	104.18

Berdasarkan data table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat merealisasikan Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan target. Hal ini berarti bahwa terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RKPD dengan RPJMD), dokumen perencanaan Perangkat Daerah konsisten dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (Renja dengan RKPD), dan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah konsistensi dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (Renstra PD dengan RPJMD) dengan Tingkat konsistensi 100 Persen.

Jika dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Badan perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 yaitu mengalami konsistensi dan kenaikan pada capaian diantaranya IKU Sasaran Strategis “Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah” pada Tahun 2022 dengan target 100% realisasi yang dicapai yaitu 100% sedangkan pada Tahun 2023 Target yang ingin dicapai yaitu 100% dan capaian Realisasi nya sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa capaian IKU Bappedalitbang menunjukan konsistensi dalam pencapaian IKU Perangkat Daerah.

Sedangkan pada IKU “Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif” pada Tahun 2022 dengan target 199 Inovasi dengan capaiannya sebesar 221 Inovasi ini menunjukan bahwa Tingkat capaian IKU pada Tahun 2022 meningkat dari target yang ditetapkan sebesar 111%, sedangkan pada Tahun 2023 menunjukan bahwa Target yang akan dicapai sebesar 239 dan capaiannya realisasi sebesar 249 Inovasi, hal ini menunjukan bahwa Capaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari Target yang telah ditetapkan sebesar 104%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bogor

Bagian ini mengulas/menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2023 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah berlangsung cukup baik hal ini terbukti dari Pencapaian Kinerja dengan angka yang sangat tinggi yaitu 100% dengan realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar 97.75 %. Dengan uraian Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Target anggaran sebesar Rp. 3.333.476.063 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 3.216.584.491 dengan Tingkat capaian Kinerja sebesar 96,49%, pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5.186.390.858 dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.989.577.711 dengan Tingkat capaian sebesar 96,21%, untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp. 1.408.832.953 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.387.179.628 dengan Tingkat capaian sebesar 98,48% dan untuk Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target anggaran Rp. 22.776.679.849 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.375.840.328 dengan Tingkat capaian sebesar 98,24%.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Setiap Perangkat Daerah pada umumnya mempunyai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, namun sebagaimana umumnya yang terjadi di Pemerintah Daerah di berbagai wilayah maka terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya :

NO.	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Implementasi penyelenggaraan perencanaan yang holistik dan terintegrasi belum terlaksana secara optimal	Keterbatasan kompetensi SDM perencana dan kelitbangan	Pengembangan aplikasi yang terintegrasi (Simral dan SIPD)
2.	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung yang valid dan akurat	Motivasi kerja yang kuat dengan tata kerja yang sistemik dan terjadwal
3.	Hasil penelitian dan pengembangan belum dijadikan dasar perumusan kebijakan	Rekomendasi dari hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah	Rencana pengembangan Forum Satu Data
		Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi diantara seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat).	Tersedianya sistem manajemen internal Bappedalitbang
			Keberadaan mitra kelitbangan dan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam perumusan rekomendasi kebijakan

Masalah pokok dalam pelaksanaan Penilaian AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan hasil dari ebaluasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh nilai sebesar 21.50 atau 86% dari nilai maksimum sebesar 25.00. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kienrja internal, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam evaluasi internal yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi

informasi (Aplikasi). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor memperoleh nilai sebesar 77,30 atau dengan predikat BB. Sedangkan pada Tahun 2023 nilai AKIP yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor memperoleh nilai sebesar 77,50.

Hambatan dari faktor internal yang berpengaruh terhadap masalah tersebut diatas disebabkan antara lain oleh :

1. Belum Optimalnya Koordinasi antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Perencana dan Peneliti
3. Belum optimalnya pengelolaan data yang terstruktur dan sistematis.
4. Belum optimalnya pengkoordinasian Program prioritas pembangunan daerah.
5. Belum sepenuhnya perencanaan pembangunan berbasis kebijakan penataan ruang.
6. Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Inovasi yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antar perangkat daerah, serta masih kurangnya pemahaman operator atau inovator di perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

Adapun hambatan dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap masalah tersebut diatas disebabkan :

1. Belum terbangunnya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah.
2. Suplai data dari Perangkat Daerah belum maksimal.
3. Masih terdapat Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan dokumen perencanaan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, telah dianalisa tantangan dan peluang dalam peningkatan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disajikan dalam Tabel berikut:

No	Tantangan	Peluang Pengembangan
1.	Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan;	Kewenangan dan peran Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
2.	Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan);	Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappedalitbang Kabupaten Bogor lebih efektif dan efisien;
3.	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan Perangkat Daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappedalitbang Kabupaten Bogor;
4.	Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;	Tuntutan stakeholder akan produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif;
5.	Rendahnya pemahaman dan animo Perangkat Daerah dalam memanfaatkan dokumen perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang.	Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
6.	Perlunya penyusunan ulang target dan indikator kinerja agar dapat lebih terukur dan memancing tumbuhnya inovasi dalam bidang perencanaan;	Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappedalitbang Kabupaten Bogor sebagai Lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
7.	Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas aparatur Bappedalitbang Kabupaten Bogor baik secara kualitas maupun secara kuantitas.	Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Bogor No 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah yang terdiri atas urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan Rencana Strategis 2018-2023 dikaji permasalahan-permasalahan dari setiap permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Implementasi penyelenggaraan perencanaan yang holistik dan terintegrasi belum terlaksana secara optimal	1. Perencanaan pembangunan masih parsial 2. Belum efektifnya koordinasi antar bidang perencanaan 3. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah, antar urusan pemerintahan 4. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah, baik di kabupaten dengan provinsi, maupun dengan nasional 5. Belum optimalnya kompetensi SDM di bidang perencanaan, baik di Bappedalitbang, maupun di perangkat daerah teknis lainnya dan kecamatan	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dengan tahunan (RKPD);	Penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu Penguatan Jaringan Penelitian Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	Merumuskan/ menyusun dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai tahapan Kerjasama Penelitian
2		Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	1. Belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Belum memadainya data dan informasi perencanaan pembangunan 3. Belum tersedia mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) dengan sistem informasi data serta monev dan pelaporan	Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3		Hasil penelitian dan pengembangan belum dijadikan dasar perumusan kebijakan	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah 2. Belum terkoordinasinya,	Penelitian dan Pengembangan yang lebih implementatif	Peningkatan kualitas dan Penguatan rekomendasi hasil	Melaksanakan pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			sinkronisasi dan integrasi program-program kelitbangan antar OPD 3. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian 4. Belum berkembangnya inovasi dalam mendukung daya saing daerah 5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kelitbangan di Pemkab Bogor	Optimalisasi kemitraan/jejaring penelitian dan inovasi Peningkatan kapasitas SDM perencanaan dan kelitbangan	penelitian dan pengembangan Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah	penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah Fasilitasi dan Pelaksanaan inovasi daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program/kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terkait Bappedalitbang adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan Bappedalitbang untuk Tahun Anggaran 2025, kecuali dalam hal anggaran, terdapat penurunan pagu anggaran yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dituangkan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Bappedalitbang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalitbang	Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Skala	4	5,262,911,567	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalitbang				5.262.911.567	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappedalitbang	Dokumen Perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Skala	5	3,605,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappedalitbang	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, KUA-PPAS, dan RAPBD	Dokumen	5	3.605.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	625,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	625.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	600,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	600.000.000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	180,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	180.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	144	200,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	144	200.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	900,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	900.000.000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappedalitbang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	990	250,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappedalitbang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	990	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	850,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah DokumenPerenc anaan PembangunanDa erah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP D/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	850.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	100	1,000,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	%	100	1.000.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	4	500,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	4	500.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	600	500,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	600	500.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	%	98	457,911,567	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Saerah dan Perangkat Daerah	Urusan/unsur/rekomendasi	3 5 72	457.911.567	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	190,796,474	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	190.796.474	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	267,115,093	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	267.115.093	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	%	99	200,000,000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Terwujudnya Pemanfaatan pengelolaan Data pada SIPD sebagai Walidata	%	100	200.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	200,000,000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	200.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah			6,555,992,896	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalitbang					
			Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	60	2,625,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dan perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terarahnya Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dan perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terarahnya Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dan perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.625.000.000	
--	--	----------------	--	---	----	---------------	--	----------------	---	--	--	---------------	--

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	40								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	300,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	300.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	200,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	7	125,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	125.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	300,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	2	300.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	300,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	300.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	200,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	200.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	450,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	450.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	750,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	750.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	%	60	1,550,992,896	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappedalitbang				4.050.363.164	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan	%	40								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	369,431,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	369.431.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	44,658,168	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	100.784.788	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	88,476,236	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	88.476.236	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	476,427,492	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	1.765.751.140	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	208,500,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	785.460.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	125,500,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	125.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	63,500,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	63.500.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	174,500,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	751.460.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang sesuai ketentuan	%	60	2,380,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan			2.755.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Wilayah yang sesuai ketentuan				
			Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan	%	40								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	375,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	375.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	225,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	225.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	70,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	70.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	600,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	600.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	525,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	525.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	40	310,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	40	310.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	40	100,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	40	100.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	550,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	550.000.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappedalitbang	Persentase hasil kelitbang yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	%	30	4,497,500,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappedalitbang	Persentase hasil kelitbang yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan daerah			3.411.000.000	
			Indeks Kualitas Kebijakan	Indek	3								

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase jumlah Inovasi yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	70								
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	25	1,882,500,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan hasil kajian Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			796.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2	125,500,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Otonomi Daerah	Laporan	2	576.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	125,500,000							

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	2	125,500,000				Laporan	2	220.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	125,500,000							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	2	125,500,000							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	2	125,500,000							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	2	125,500,000							

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	2	125,500,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	2	220.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Bappedalitbang	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	2	125,500,000							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	2	125,500,000							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	2	125,500,000							
	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	125,500,000							

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomen dasi	2	125,500,000							
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	125,500,000							
	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan	2	125,500,000							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan hasil kajian Bidang Sosial dan kependudukan	%	20	880,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan hasil kajian Bidang Sosial dan kependudukan			660.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen	3	660,000,000				Dokumen	3	660.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	2	220,000,000							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan	%	30	780,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappedalitbang	Persentase ketersediaan hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan			1.000.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	340,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			400.000.000	
							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	200.000.000	
							Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	200.000.000	
							Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	200.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	220,000,000							
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	220,000,000							
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappedalitbang	Persentase Inovasi yang berkembang dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	%	50	955,000,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappedalitbang	Persentase Inovasi yang berkembang dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi	270	955.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	430,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	430.000.000	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	117,000,000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan	Laporan	1	117.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Penerapan Teknologi				
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	133,000,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	133.000.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	52,000,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	52.000.000	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	223,000,000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	223.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappedalitbang	Nilai SAKIP Bappedalitbang	POIN	70.50	28,795,435,864	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappedalitbang				29.431.958.704	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	INDEKS	5	858,157,602	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Tersedianya Data Perencanaan dan Data Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	958.157.602	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	397,620,774	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	397.620.774	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	34,921,154	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	34.921.154	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	23,610,899	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	23.610.899	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	23,980,244	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	23.980.244	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	41,639,335	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	41.639.335	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	71,639,335	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	71.639.335	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	264,745,861	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	264.745.861	
							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan	%	98	19,145,391,140	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Tersedianya Laporan keuangan perangkat daerah dengan baik	Dokumen	12	19.145.391.140	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	18,885,083,404	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	18.885.083.404	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	96,592,088	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	96.592.088	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	74,509,899	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12	74.509.899	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	21,671,993	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	21.671.993	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	44,743,237	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	44.743.237	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	22,790,519	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	22.790.519	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	95	64,587,032	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Tersedianya Rencana Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	64.587.032	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	22,790,519	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	22.790.519	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	21,703,538	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	21.703.538	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	20,092,975	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	20.092.975	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	95	746,973,817	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Pelayanan Administrasi Kepegawaian terlaksana dengan baik	Dokumen	3	746.973.817	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappedalitbang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	150	28,146,101	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappedalitbang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	28.146.101	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappedalitbang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	111,396,560	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappedalitbang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	111.396.560	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	30,586,880	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	30.586.880	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	50,586,880	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	50.586.880	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	95,104,020	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	95.104.020	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappedalitbang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	110,905,636	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappedalitbang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	110.905.636	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	31,659,965	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	31.659.965	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	288,587,775	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappedalitbang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	288.587.775	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	95	2,858,081,537	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan umum kantor	Dokumen	10	2.814.106.488	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	179,209,928	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	179.209.928	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	533,557,908	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	533.557.908	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	388,684,597	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappedalitbang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	388.684.597	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	169,606,230	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	169.606.230	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	140,371,462	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappedalitbang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	140.371.462	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6755	43,975,049							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7450	275,714,248	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	22200	275.714.248	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	864,004,182	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	864.004.182	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	55,652,457	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	55.652.457	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	207,305,476	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	207.305.476	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Pengadaan Sarana Kantor Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	98	1,675,173,925	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappedalitbang	Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor	Paket	5	2.075.173.925	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalitbang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	350,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalitbang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			750.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappedalitbang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	1	726,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappedalitbang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	4	726.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Lapangan yang Disediakan						Lapangan yang Disediakan				
	Pengadaan Mebel	Bappedalitbang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24	290,235,326	Pengadaan Mebel	Bappedalitbang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	290.235.326	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	36,214,747	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	36.214.747	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	178,223,852	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	178.223.852	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	94,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	94.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Persentase Penyediaan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	%	97	1,786,646,041	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Kantor	Dokumen	3	2.144.356.724	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	900	9,312,363	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	900	9.312.363	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	993,318,765	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	993.318.765	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	6,725,596	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	6.725.596	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	777,289,317	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappedalitbang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.135.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan	%	98	1,660,424,770	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalitbang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan baik	Dokumen	6	1.483.211.976	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Bappedalitbang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	26	397,760,314	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Bappedalitbang	Jumlah Kendaraan	Unit	26	397.760.314	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
	Pemeliharaan Mebel	Bappedalitbang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	21	27,212,794	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	112.992.596	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	112,992,596	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	132	50.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	532	50,000,000							
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappedalitbang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	150,000,000							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	644,924,030	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	644.924.030	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	48	156,840,894	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	48	156.840.894	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	120,694,142	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	120.694.142	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat diuraikan sebagai hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, seperti perangkat daerah perbatasan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Namun untuk Bappedalitbang Kabupaten Bogor tidak ada usulan dari masyarakat yang terkait langsung program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bogor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan perencanaan antara Tingkat Kabupaten/kota, Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan salah satu factor kunci keberhasilan perencanaan Pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan telaahan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indicator tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas RI.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas RI menjadi actor utama yang Menyusun program Pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2020-2024: “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan Pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional mensinkronisasi kegiatan Tahun 2024-2025 ada delapan Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam Prioritas Nasional Tahun 2024-2025 yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

- Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKTOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Produk dokumen perencanaan selesai tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	%	Rp. 5,627,268,852
		2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya kesesuaian substansi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijaksanaan propinsi dan Nasional	Tingkat kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	100	%	Rp. 13,444,431,000
		3. Program Riset dan Inovasi Daerah	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung substansi perencanaan dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	100	%	Rp. 5,985,000,000

Telaahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang terhadap kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat ada 3 program yang menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Program Kegiatan Dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKTOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Meningkatkan kualitas demokrasi dan bikrokrasi yang didukung oleh inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung substansi perencanaan dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	100	%	Rp. 5.985.000.000

3.3
Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 3. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 5. Pelaksanaan administrasi Badan; 6. Pelaksanaan reformasi Birokrasi 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.	Bappedalitbang

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sehingga program dan kegiatan yang akan di capai dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor sesuai pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 adalah “Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas” dengan Indikator Tujuan Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional dengan Sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Dengan indikator sasaran atau IKU yang akan di capai adalah:
 - Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan Target 100%)
2. Penelitian dan Pengembangan yang inovatif
 Dengan Indikator sasaran atau IKU yang akan dicapai adalah:
 - Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir (dengan target 100%)
 - Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor (dengan target 100%)

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025

URAIAN	TOLAK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
	1	2	3	4	
TUJUAN	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarasan (Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Provinsi/Nasional = (Jumlah prioritas pembangunan provinsi/Nasional yang didukung oleh prioritas daerah sesuai kondisi wilayah/Jumlah prioritas pembangunan provinsi/nasional) x 25% Kesesuaian (Jumlah program perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan/Jumlah program Perencanaan pembangunan kabupaten Bogor x 100%) Ketepatan (tepat waktu/tidak tepat waktu) Kelitbangan (Berapa Kajian yang	100	%

URAIAN	TOLAK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
	1	2	3	4	
			dimanfaatkan /Kajian yang dibuat)		
	Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Tingkat Kualitas inovasi, penelitian dan pengembangan daerah	(inovasi yang dimanfaatkan /inovasi yang didata x 100%) + (Kajian litbang yang dimanfaatkan /Kajian yang disusun x 100%)/2	100	%
SASARAN	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah = (Jumlah program dalam RKPD / Jumlah program yang akan dicapai RPJMD) x 100%	100	%
	Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diterapkan	Hasil penelitian yang dimanfaatkan / Hasil penelitian yang telah dilaksanakan x 100%	100	%
		Terwujudnya Optimalisasi fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi daerah yang difasilitasi Penerapannya	100	%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor didasarkan pada beberapa faktor diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2025 mencakup 4 Program dengan 17 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	4	12	4.375.952.360
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	1	8	12.700.874.962
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1	8	
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1	8	
Bidang Program Riset dan Inovasi Daerah	1	2	8	2.198.800.000
Sekretariat	1	8	48	30.825.458.537
Jumlah Anggaran				52.341.770.633

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur APBD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 wajib mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, RKPD Tahun Anggaran 2025 sudah menggunakan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator Kinerja berdasarkan hasil pemetaan (mapping) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 mempunyai 4 Program, 17 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.52.341.770.633,- dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					52,341,770,633.00	Bappedalitbang	APBD		55,352,102,942.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Data Perencanaan dan Data Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	649,738,437.00	Bappedalitbang	APBD	17 Dokumen	872,498,388.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	254,430,473.00	Bappedalitbang	APBD	9 Dokumen	399,608,878.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	21,826,098.00	Bappedalitbang	APBD	1 Dokumen	35,095,760.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	23,941,813.00	Bappedalitbang	APBD	1 Dokumen	23,728,953.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	27,322,568.00	Bappedalitbang	APBD	1 Dokumen	24,100,145.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	21,565,331.00	Bappedalitbang	APBD	1 Dokumen	41,847,531.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	134,202,242.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	71,997,531.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	161,951,296.00	Bappedalitbang	APBD	17 Laporan	266,069,590.00
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	4,498,616.00	Bappedalitbang	APBD		10,050,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan keuangan perangkat daerah dengan baik	Dokumen	12	18,884,537,919.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	19,218,213,623.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	18,747,326,348.00	Bappedalitbang	APBD	14 Orang/Bulan	18,979,508,821.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	42,355,390.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	97,075,048.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	25,465,877.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	74,882,448.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	23,325,871.00	Bappedalitbang	APBD	1 laporan	21,780,353.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan	18	46,064,433.00	Bappedalitbang	APBD	18 Laporan	44,966,953.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Rencana Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	37,279,220.00	Bappedalitbang	APBD	4 Dokumen	64,909,967.00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	8,040,342.00	Bappedalitbang	APBD	1 Dokumen	22,904,472.00
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9,145,934.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	21,812,055.00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	28	20,092,944.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	20,193,440.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Kepegawaian terlaksana dengan baik	Dokumen	3	960,493,921.00	Bappedalitbang	APBD	3 Dokumen	750,708,685.00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	153	28,142,553.00	Bappedalitbang	APBD	150 Unit	28,286,831.00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	260	110,753,136.00	Bappedalitbang	APBD	150 Paket	111,953,543.00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	30,586,802.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	30,739,814.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	50,586,698.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	50,839,814.00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	44,504,297.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	95,579,540.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	145	245,333,025.00	Bappedalitbang	APBD	11 Orang	111,460,164.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	161,999,877.00	Bappedalitbang	APBD	135 Orang	31,818,265.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	153	288,587,533.00	Bappedalitbang	APBD	100 Orang	290,030,714.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan umum kantor	Dokumen	10 Dokumen	4,294,577,339.00	Bappedalitbang	APBD	10 Dokumen	2,828,177,019.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	179,209,928.00	Bappedalitbang	APBD	8 Paket	180,105,978.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	2,006,153,672.00	Bappedalitbang	APBD	25 Paket	536,225,698.00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	388,678,547.00	Bappedalitbang	APBD	4 Paket	390,628,020.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	169,606,230.00	Bappedalitbang	APBD	3 Paket	170,454,261.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	148,252,599.00	Bappedalitbang	APBD	3 Paket	141,073,319.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	-	275,714,248.00	Bappedalitbang	APBD	7450 laporan	277,092,819.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	864,004,182.00	Bappedalitbang	APBD	450 Laporan	868,324,202.00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	55,652,457.00	Bappedalitbang	APBD	12 Dokumen	55,930,719.00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	207,305,476.00	Bappedalitbang	APBD	1 Dokumen	208,342,003.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor	Paket	5	2,213,870,692.00	Bappedalitbang	APBD	5 Paket	2,119,299,794.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	20	109,596,960.00	Bappedalitbang	APBD		787,500,000.00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	1,350,677,804.00	Bappedalitbang	APBD		729,630,000.00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	288,806,238.00	Bappedalitbang	APBD	6 Unit	291,686,502.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	99,983,861.00	Bappedalitbang	APBD	25 Unit	36,395,821.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	178,195,293.00	Bappedalitbang	APBD	5 Unit	179,114,971.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	186,610,536.00	Bappedalitbang	APBD	4 Unit	94,972,500.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Kantor	Dokumen	3	2,116,315,989.00	Bappedalitbang	APBD	3 Dokumen	2,265,741,008.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,600,000.00	Bappedalitbang	APBD	1000 Laporan	9,358,925.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	993,318,765.00	Bappedalitbang	APBD	4 Laporan	998,285,359.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	6,725,596.00	Bappedalitbang	APBD	3 Laporan	6,759,224.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,110,671,628.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	1,251,337,500.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan baik	Dokumen	6	1,668,645,020.00	Bappedalitbang	APBD	6 Dokumen	1,438,389,234.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	397,748,300.00	Bappedalitbang	APBD	28 Unit	397,760,314.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	112,931,400.00	Bappedalitbang	APBD	80 Unit	113,557,559.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	881,033,640.00	Bappedalitbang	APBD	532 Unit	648,148,650.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	76	156,510,000.00	Bappedalitbang	APBD	50 Unit	157,625,098.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,421,680.00	Bappedalitbang	APBD	11 Unit	121,297,613.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kantor atau Bangunan Lainnya								
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					4,375,952,360.00	Bappedalitbang	APBD		5,287,741,124.00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, KUA-PPAS, dan RAPBD	Dokumen	5	2,829,550,841.00	Bappedalitbang	APBD	5 Dokumen	3,621,540,000.00
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	267,498,047.00	Bappedalitbang	APBD	2 Dokumen	628,125,000.00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	473,551,485.00	Bappedalitbang	APBD	6 Dokumen	606,015,000.00
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	37,755,060.00	Bappedalitbang	APBD	1 Berita Acara	180,900,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	53,483,301.00	Bappedalitbang	APBD	72 Berita Acara	201,000,000.00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	923,677,833.00	Bappedalitbang	APBD	1 Berita Acara	900,000,000.00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	40/3	440,572,374.00	Bappedalitbang	APBD	990 Usulan	251,250,000.00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	633,012,741.00	Bappedalitbang	APBD	2 Dokumen	854,250,000.00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat keterisian data indikator dalam dokumen perencanaan	%	100	917,389,195.00	Bappedalitbang	APBD	100%	1,005,000,000.00
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	4	418,687,465.00	Bappedalitbang	APBD		502,500,000.00
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	600	498,701,730.00	Bappedalitbang	APBD	650 Orang	502,500,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Saerah dan Perangkat Daerah	urusan unsur rekomendasi	3 5 72	457,910,998.00	Bappedalitbang	APBD		460,201,124.00
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan	2	267,114,807.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	191,750,456.00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan	2	190,796,191.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	268,450,668.00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Terwujudnya Pemanfaatan pengelolaan Data pada SIPD sebagai Walidata	%	100	171,101,326.00	Bappedalitbang	APBD	100%	201,000,000.00
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	171,101,326.00	Bappedalitbang	APBD	2 Dokumen	201,000,000.00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI					12,700,874,962.00	Bappedalitbang	APBD		14,429,424,100.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					4,170,629,010.00	Bappedalitbang	APBD		4,862,000,000.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	353,443,000.00	Bappedalitbang	APBD	2 Dokumen	415,000,000.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	3	176,721,295.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	210,000,000.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	5	220,901,647.00	Bappedalitbang	APBD	5 Laporan	265,000,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	3	371,115,372.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	437,000,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	1,104,510,035.00	Bappedalitbang	APBD	2 Dokumen	1,280,000,000.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	3	220,902,007.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	260,000,000.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	5	397,623,612.00	Bappedalitbang	APBD	5 Laporan	465,000,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	4	1,325,412,042.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	1,530,000,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					3,523,083,852.00	Bappedalitbang	APBD		2,573,374,100.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	731,959,467.00	Bappedalitbang	APBD	3 Dokumen	406,374,100.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	159,999,681.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	110,000,000.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	59,999,663.00	Bappedalitbang	APBD	4 Laporan	165,000,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	6	868,093,739.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	1,100,000,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	1,293,039,830.00	Bappedalitbang	APBD	3 Dokumen	434,500,000.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	159,999,696.00	Bappedalitbang	APBD	3 Laporan	137,500,000.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	9	104,500,000.00	Bappedalitbang	APBD	7 Laporan	104,500,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	189,991,926.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	115,500,000.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					5,007,162,100.00	Bappedalitbang	APBD		6,994,050,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	1,299,999,461.00	Bappedalitbang	APBD	3 Dokumen	550,000,000.00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	199,999,782.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	330,000,000.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	99,982,445.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	275,000,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	1,244,716,271.00	Bappedalitbang	APBD	4 Laporan	2,860,000,000.00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	648,162,374.00	Bappedalitbang	APBD	3 Dokumen	1,457,500,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	309,977,177.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	311,550,000.00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	99,974,020.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	110,000,000.00
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	1,104,350,570.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	1,100,000,000.00
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					4,439,484,774.00	Bappedalitbang	APBD		6,077,000,000.00
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					2,334,755,274.00	Bappedalitbang	APBD		3,999,000,000.00
		Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	2		Bappedalitbang	APBD		
		Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	naskah	9	2,334,755,274.00	Bappedalitbang	APBD		3,999,000,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1		Bappedalitbang	APBD		
	Invensi dan Inovasi					2,104,729,500.00	Bappedalitbang	APBD		2,078,000,000.00
		Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	218,774,882.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	100,000,000.00
		Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	1	221,999,658.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	840,000,000.00
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	116,999,083.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	244,000,000.00
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	1	51,999,699.00	Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	134,000,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	1	184,999,883.00	Bappedalitbang	APBD	1 Kegiatan	62,000,000.00
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	2	509,999,607.00	Bappedalitbang	APBD	2 Laporan	228,000,000.00
		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1		Bappedalitbang	APBD	1 Laporan	470,000,000.00

BAB V P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bogor Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor yang mendukung Reformasi Birokrasi. Sebagai bagian dari perencanaan tahun 2024-2026, diharapkan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bogor dapat menjadi pedoman dalam tahapan penganggaran hingga ditetapkannya APBD Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bogor juga diharapkan dapat menjadi acuan pihak-pihak terkait dalam bersinergi mendukung pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten bogor. Disamping itu juga perlu adanya komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program Pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu Strategis terkini.

Pj. BUPATI BOGOR,

ASMAWA

BAB V

P E N U T U P

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang Tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI BOGOR,


ASMAWA